

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka menulis skripsi terkait Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Selama Masa Pendudukan Jerman Tahun 1940-1945, maka peneliti dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pendudukan negara Belanda oleh Jerman pada tahun 1940-1945 terjadi karena beberapa faktor, utamanya adalah faktor-faktor strategis. Secara geografis, Belanda memiliki posisi penting bagi operasi militer Jerman, khususnya sebagai basis untuk menyerang Inggris dan mengamankan Laut Utara. Selain itu, pendudukan ini bertujuan untuk mencegah Inggris dan Sekutu memperkuat pertahanan di Eropa Barat. Dari segi ekonomi, Jerman ingin mengeksploitasi sumber daya Belanda, khususnya sumber daya industri dan tenaga kerja Belanda, guna mendukung upaya perang mereka.

Lebih jauh, pendudukan ini sejalan dengan visi Hitler untuk menyatukan negara-negara yang dianggap sebagai bagian dari ras "Arya" dalam Kekaisaran Jermanik Raya (*Großgermanisches Reich*), di mana Belanda dipandang sebagai bagian dari visi tersebut. Oleh karena itu, pendudukan Belanda tidak hanya bersifat militer dan ekonomi, tetapi juga ideologis sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan wilayah dan masyarakat Belanda.

Kedua, dimulainya pendudukan Jerman di Belanda pada tahun 1940-1945 ditandai dengan kebijakan represif di berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Secara politik, Jerman mendirikan *Reichskommissariat* yang dipimpin oleh Arthur Seyss-Inquart untuk mengendalikan Belanda dan mengintegrasikannya ke dalam sistem perpolitikan Nazi. Dari segi ekonomi, Jerman mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Belanda untuk mendukung upaya perang mereka, hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kelangkaan berbagai kebutuhan pokok yang memuncak dalam peristiwa Kelaparan Musim Dingin (*Hunger Winter*).

Di bidang sosial dan budaya, sensor ketat diterapkan melalui Departemen Informasi Publik dan Seni (DVK), yang memastikan hanya propaganda pro-Jerman

yang dapat diakses masyarakat. Selain itu, tindakan paling ekstrim yang diterapkan oleh *Reichskommissariat* Belanda adalah persekusi terhadap komunitas Yahudi Belanda. Presekusi ini diawali dengan diskriminasi dan isolasi orang-orang Yahudi Belanda, namun di tahun 1941 tindakan ini memuncak hingga akhirnya dilakukan deportasi massal ke kamp-kamp konsentrasi, yang mengakibatkan kematian sebagian besar populasi Yahudi di Belanda.

Ketiga, Pendudukan Jerman di Belanda, yang dimulai pada Mei 1940, membawa tekanan besar bagi masyarakat. Sejak awal, *Reichskommissariat* memberlakukan aturan-aturan ketat, untuk mengintegrasikan Belanda ke dalam sistem Jerman. Di bawah pimpinan Arthur Seyss-Inquart, beberapa kelompok dan individu Belanda mulai berkolaborasi dengan pihak otoritas Jerman tersebut.

Selama berkuasa di Belanda, Nazi melalui *Reichskommissariat* kerap berusaha menarik dukungan rakyat Belanda dengan menawarkan insentif bagi mereka yang bersedia bekerja sama, seperti peluang pekerjaan di pemerintahan pendudukan dan akses ke barang-barang langka selama perang. Faktor ini mendorong sebagian orang Belanda menjadi kolaborator bagi *Reichskommissariat*. Biasanya, kolaborasi datang dari mereka yang mendukung nasional sosialisme atau bersikap pro-Jerman. Namun, banyak juga yang terpaksa tunduk, terutama para pegawai negeri dan pebisnis yang bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik Belanda.

Sementara itu, kolaborasi politik dan ideologis di Belanda sering kali dilakukan untuk memperoleh posisi atau kekuasaan dalam pemerintahan pendudukan Jerman. Orang-orang yang bersimpati pada nasional sosialisme atau bersikap pro-Jerman biasanya bergabung dengan organisasi NSB (*Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland*). Selama masa pendudukan, anggota NSB dipandang buruk oleh masyarakat Belanda; mereka dianggap sebagai pengkhianat, oportunis yang mengejar keuntungan pribadi, dan sering kali diidentikkan dengan reputasi sosial yang rendah.

Walau demikian, selama masa pendudukan NSB hanya berperan sebagai aktor politik di tingkat lokal. Seiring waktu, mereka diakui sebagai sumber utama kandidat untuk mengisi posisi pemerintahan lokal yang kosong, sehingga aktif

terlibat dalam pembagian kekuasaan di tingkat rendah. Selain itu, *Reichskommissariat* memanfaatkan NSB secara organisasi maupun massa dalam dua fungsi utama: sebagai organisasi politik sekutu dan sebagai penyedia pegawai pemerintahan di tingkat lokal. Selain itu, anggota NSB sering menjadi perpanjangan tangan otoritas pendudukan Jerman dalam mengontrol masyarakat, bersama SS, polisi, dan unit militer lainnya. Jerman hanya menginginkan NSB sebagai pendukung kebijakan Nazi, tanpa memberikan jalan independen bagi Belanda menjadi negara yang berdaulat atau memungkinkan NSB memimpin negara.

Di lain sisi, terdapat pula kelompok kolaborator politik lain seperti NU (*Nederlandsche Unie*). NU muncul sebagai pesaing utama NSB dalam kolaborasi politik dengan *Reichskommissariat* dan didirikan pada Juli 1940. NU berusaha menyesuaikan diri dengan situasi politik yang berubah di Belanda dan Eropa, dengan visi membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan sosial. NU percaya bahwa kolaborasi dengan otoritas Jerman dan Belanda adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Basis dukungan NU terbukti jauh lebih luas dibandingkan NSB, karena gerakan ini dilihat sebagai jalan tengah dalam menghadapi pendudukan.

NU mengadopsi sikap kolaborasi terbatas, bertindak sebagai penengah antara Jerman dan masyarakat Belanda. Ini terlihat ketika NU mengajak masyarakat Belanda untuk menerima "keadaan yang telah berubah" serta beradaptasi dengan situasi pendudukan sambil mempertahankan identitas Belanda. Disaat yang sama, mereka juga menolak mendukung invasi Jerman ke Uni Soviet pada Juni 1941, karena mereka khawatir hal ini akan memperburuk hubungan dengan Inggris.

Baik NSB maupun NU melihat kerja sama dengan pihak *Reichskommissariat* ini sebagai cara menjaga kestabilan dan menghindari represi lebih berat. Meskipun demikian, Karena posisi Belanda sepenuhnya berada di bawah kendali Jerman, maka Jerman pun menerapkan kebijakan yang melibatkan penduduk lokal dalam organisasi militer dan keamanan seperti di berbagai wilayah pendudukan lainnya.

Belanda sendiri menjadi salah satu negara dengan jumlah sukarelawan terbesar yang bergabung dengan *Waffen-SS* jika dilihat dari proporsi populasinya.

Banyak warga Belanda yang mendaftar ke militer Jerman segera setelah pendudukan dimulai. Menariknya, antusiasme mereka untuk bergabung dengan *Waffen-SS* bukan didorong oleh nasionalisme sebagai orang Belanda atau kebanggaan sebagai bagian dari "bangsa Arya." Namun sebaliknya, banyak dari sukarelawan ini, terutama yang sudah berpengalaman, lebih termotivasi oleh keinginan untuk melawan komunisme.

Keempat, Tidak semua orang di Belanda setuju untuk bekerja sama dengan pihak Jerman. Banyak warga Belanda yang memutuskan untuk melawan pendudukan Jerman, dimulai dengan aksi simbolis seperti mengenakan simbol nasional dan diikuti dengan aksi-aksi perlawanan yang lebih terorganisir. Mogok kerja, sabotase infrastruktur, penyelundupan barang dan penyelamatan buruh dan orang Yahudi Belanda menjadi bentuk-bentuk perlawanan yang kerap muncul dan seiring berjalannya waktu pun semakin meluas.

Dalam hal aksi mogok kerja, gerakan ini merupakan Gerakan perlawanan yang dapat menarik dukungan besar dari masyarakat dan buruh di pabrik-pabrik Belanda. Aksi ini tidak hanya menjadi sarana untuk memprotes kondisi kerja yang buruk dan perlakuan diskriminatif, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan *Reichskommissariat* yang semakin menekan kehidupan sehari-hari. Pemogokan ini berfungsi sebagai ekspresi kolektif masyarakat untuk menolak aturan pendudukan yang membatasi hak-hak dan kebebasan mereka.

Namun, Aksi pemogokan ini membuat Seyss-Inquart sadar bahwa masyarakat Belanda benar-benar serius dalam protes mereka terhadap kebijakan *Reichskommissariat*. Sebagai respons, pasukan di bawah komando *SS-Gruppenführer* Rauter segera dikerahkan untuk menghentikan aksi ini. Rauter memerintahkan pasukannya untuk menindak pemogokan tersebut dengan tembakan dan penangkapan massal, serta menjatuhkan hukuman mati untuk memberi efek jera dan mencegah pemogokan serupa di masa mendatang.

Sementara itu, terdapat juga kelompok yang melakukan perlawanan dengan melakukan berbagai aksi sabotase, penyelundupan barang dan penyelamatan buruh serta orang-orang Yahudi Belanda. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya adalah: *Knokploegen* yang lahir sebagai kelompok geng dan sebagai respon

terhadap kekerasan yang dilakukan anggota NSB dan pihak berwenang Jerman di Belanda. Lalu terdapat *Groep 2000* di bawah pimpinan Jacoba van Tongeren yang kerap membantu orang-orang bersembunyi, termasuk orang Yahudi, pejuang perlawanan, dan pemuda yang berusaha menghindari kerja paksa di Jerman. Kelompok ini juga menyelundupkan dan mendistribusikan berbagai kupon makanan dan ransum secara diam-diam. Terdapat pula kelompok *Onderduikers* yang pada awalnya merupakan sekumpulan pekerja yang bersembunyi agar tidak ditarik menjadi tenaga kerja paksa. Namun pada akhirnya, merekalah yang menjadi kelompok yang kerap memberi tempat persembunyian, identitas palsu dan sejumlah uang kepada orang-orang yang sedang bersembunyi.

Kelompok perlawanan juga bekerja sama dengan Sekutu untuk melemahkan kekuatan pendudukan Jerman. Kerjasama ini terjadi Ketika pasukan Sekutu mulai mendekat dan memasuki wilayah Belanda dalam usahanya untuk melawan Jerman pada Perang Dunia II. Kelompok PAN (*Partizanenactie Nederland*/Aksi Partisan Belanda) memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sabotase rel kereta di sekitar Eindhoven. Selain itu, PAN juga mendukung operasi Sekutu dengan terlibat dalam pertempuran langsung, dan membantu Divisi Penerjun ke-101 Amerika Serikat serta Divisi Lapis Baja Inggris melalui pemberian informasi terkait posisi pasukan Jerman.

Di lain sisi, melalui siaran Radio Oranje, Pemerintahan Belanda dalam pengasingan mengumumkan bahwa berbagai kelompok perlawanan, seperti *Orde Dienst*, *Raad van Verzet*, dan *Knokploegen*, akan bersatu dalam organisasi *Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten* (NBS) yang dipimpin oleh Henri Koot, mantan kolonel KNIL. Setelah terbentuknya NBS, aksi perlawanan dari ketiga kelompok ini semakin intensif, dipicu oleh meningkatnya kekerasan dari pihak Reichskommissariat yang bertujuan menekan perlawanan masyarakat Belanda. Namun, aksi-aksi ini sering berujung pada pembantaian dan penghancuran wilayah oleh pasukan pendudukan.

Pada akhirnya, setelah pasukan Sekutu yang terus melaju masuk ke wilayah Jerman baik dari front barat dan timur serta Hitler yang melakukan bunuh diri harapan akan berakhirnya perang pun muncul. Pada tanggal 4 Mei 1945, delegasi

Jerman yang diwakili oleh Karl Dönitz, menandatangani dokumen penyerahan di Lüneburg Heath, menandakan bahwa Jerman telah kalah dalam Perang Dunia II. Penyerahan tanpa syarat tersebut pun mengakhiri pendudukan Jerman di Belanda dan membuka jalan bagi kembalinya keluarga Kerajaan Belanda serta pemerintahan resmi Belanda dari pengungsian mereka di Inggris.

Secara keseluruhan, pendudukan Jerman di Belanda menunjukkan kompleksitas hubungan antara masyarakat Belanda dan pihak *Reichskommissariat* yang muncul dalam bentuk berbagai aksi kolaborasi dan perlawanan. Setiap pilihan, baik untuk berkolaborasi atau melawan, didasarkan pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dirasakan masyarakat Belanda saat itu. Respons mereka terhadap pendudukan inilah yang menjadi catatan sejarah penting yang akan terus dipelajari dan disikapi hingga kini.

5.2 Saran

Skripsi yang berjudul “*Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Selama Masa Pendudukan Jerman Tahun 1940-1945*” ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia akademis dan penulisan sejarah. Selain itu, berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka skripsi ini pun diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji sejarah dengan tema serupa. Penelitian ini masih memiliki banyak aspek yang belum dibahas secara mendalam, khususnya mengenai kolaborasi dan perlawanan masyarakat secara terperinci. Hal-hal tersebut diantaranya adalah data-data terkait kolaborator Belanda yang berada di tingkat lokal atau rendah serta perlawanan kelompok atau individu yang lebih bersifat sporadis dan reaksioner. Selain itu, . Bagi peneliti yang akan melanjutkan pembahasan tentang kolaborator Belanda, disarankan untuk mencari data dan arsip yang lebih lengkap. Pada awal tahun 2025, pemerintah Belanda berencana membuka akses informasi mengenai 300.000 orang yang diselidiki atas dugaan kolaborasi dengan Nazi. Saat penelitian ini dibuat, akses data tersebut masih sangat terbatas karena undang-undang perlindungan yang berlaku, namun arsip-arsip ini akan lebih mudah diakses publik setelah undang-undang tersebut berakhir di tahun 2025 mendatang.